

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN INKLUSI DAN TINJAUAN ETIS BERDASARKAN NILAI-NILAI KRISTEN

Eden Eidelyn Ester¹⁾ Ni Made Suciningsih²⁾ Ni Made Raka Witari³⁾ Basilius Redan Werang⁴⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali

²⁾ Universitas Pendidikan Ganesha

³⁾ Universitas Pendidikan Ganesha

⁴⁾ Universitas Pendidikan Ganesha

Email: ts.nonaeden@gmail.com

Abstrak

Pendidikan inklusi bertujuan memberikan hak belajar yang sama kepada semua siswa, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Namun dalam penerapannya di Indonesia masih ada beberapa hambatan, seperti kurangnya kompetensi guru, fasilitas, stigma di masyarakat, dan kebijakan yang belum cukup baik. Hal-hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan inklusi belum berjalan dengan adil dan berkeadilan. Penelitian ini mencoba memahami masalah dalam pendidikan inklusi di Indonesia dari perspektif etika Kristen. Hasilnya menunjukkan bahwa kelemahan dalam menerapkan pendidikan inklusi mencerminkan ketidakmampuan sistem pendidikan untuk menghargai harga diri manusia sebagai gambar Allah, kurangnya sumber daya pendidikan yang memadai, serta rendahnya sikap hospitalitas di lingkungan belajar. Oleh karena itu, pendidikan inklusi perlu dilihat melalui pendekatan etika Kristen yang memperhatikan harga diri manusia, keadilan, dan sikap hospitalitas sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan praktek pendidikan.

Kata-kata kunci: Pendidikan, Inklusi, ABK, Etika, Kristen

Abstract

Inclusive education aims to provide equal learning rights to all students, including children with special needs. However, in its implementation in Indonesia, there are still several obstacles, such as a lack of teacher competence, facilities, stigma in society, and policies that are not yet adequate. These issues indicate that the inclusive education system is not yet running fairly and equitably. This study attempts to understand the problems in inclusive education in Indonesia from a Christian ethical perspective. The results show that the weaknesses in implementing inclusive education reflect the inability of the education system to respect human dignity as the image of God, the lack of adequate educational resources, and the low level of hospitality in the learning environment. Therefore, inclusive education needs to be viewed through a

Christian ethical approach that considers human dignity, justice, and hospitality as the basis for educational policy and practice.

Keywords: *Inclusive Education, ABK, Christian Ethics*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa terkecuali, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini diperkuat oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.¹ Secara lebih spesifik, tujuan pendidikan inklusi dalam sistem pendidikan nasional meliputi beberapa aspek penting. Pertama, mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.² Kedua, memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah terdekat di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga mereka tidak harus jauh dari keluarga untuk mengakses pendidikan layak. Ketiga, memupuk sikap toleransi, empati, dan saling menghargai perbedaan di kalangan peserta didik sejak dini, sehingga dapat tercipta masyarakat yang inklusif dan harmonis di masa depan.

Pendidikan inklusi juga bertujuan untuk mengurangi diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus dan membantu mengembangkan pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap keberagaman. Melalui

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” (2003).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

pendidikan inklusi, peserta didik reguler belajar untuk menerima dan menghargai teman-temannya yang memiliki perbedaan, sementara peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal dalam lingkungan yang lebih natural dan tidak terisolasi. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi seluruh komunitas sekolah dalam membangun karakter dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Penerapan dari amanat konstitusi tersebut diwujudkan melalui sistem pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama.

Pendidikan inklusi telah menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep pendidikan inklusi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an sebagai respons terhadap gerakan Education for All yang diprakarsai oleh UNESCO. Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi sejak tahun 2004 melalui Deklarasi Bandung, yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.³

Sekalipun landasan hukum telah tersedia, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika kompleks. Sari dan Hendriani mengidentifikasi bahwa hambatan utama pendidikan inklusi mencakup tenaga pendidik yang kurang terlatih, stigma negatif masyarakat, kebijakan otoritas yang kurang aplikatif, kurangnya pengetahuan tenaga pendidik, hambatan aksesibilitas, keterbatasan sumber

³ “Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.” (n.d.).

belajar, dan keterbatasan finansial.⁴ Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua anak.

Di sinilah berbagai problematika pendidikan inklusi mulai tampak jelas dan menuntut perhatian yang lebih serius. Tanpa pemahaman yang mendalam dan dukungan sistem yang memadai, pendidikan inklusi berisiko hanya menjadi program, bukan praktik nyata yang benar-benar memberikan kesempatan belajar yang adil dan bermakna bagi setiap anak. Problematika pendidikan inklusi pun menjadi sangat beragam, dan beberapa di antaranya tampak paling menonjol dalam implementasi di lapangan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji Pendidikan inklusi dari aspek pedagogis, kebijakan dan manajerial sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada persoalan teknis implementasi seperti kompetensi guru, sarana prasarana dan efektivitas kebijakan. Kajian yang menelaah Pendidikan inklusi dari perspektif etika Kristen masih terbatas. Padahal Pendidikan inklusi tidak hanya tentang efektivitas sistem pembelajaran namun menyangkut persoalan mendasar mengenai nilai manusia, keadilan sosial dan tanggung jawab moral tiap institusi Pendidikan terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, tulisan ini diarahkan untuk menjawab: pertama, apa saja problematika Pendidikan inklusi di Indonesia dan bagaimana ini diterapkan. Kedua, bagaimana problematika tersebut ditinjau dari perspektif etika Kristen. Ketiga, bagaimana nilai Imago Dei, Keadilan, dan hospitalitas dapat berfungsi sebagai kerangka normatif dalam membangun praktik pendidikan inklusi.

⁴ W. Sari, P. M., & Hendriani, "Hambatan Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur.," *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 2021, 163-175.

Landasan Teori Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga Negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak pada umumnya supaya bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupannya.⁵ Karena itu sekolah reguler sekalipun di harapkan dapat menerapkan Pendidikan inkusi untuk mengatasi diskriminasi. Pendidikan inklusi merujuk pada suatu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak tanpa membeda-bedakan latar belakang karena keterbatasan fisik ataupun mental untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan pada umumnya.⁶

Meninjau dari prinsip *fair equality of opportunity* John Rawls yang dibahas oleh Alexander, Prinsip kesetaraan kesempatan yang adil mensyaratkan bahwa mereka yang memiliki bakat dan kemampuan alamiah yang setara, serta memiliki kemauan yang sama untuk menggunakannya, harus memiliki prospek kesuksesan yang sama, terlepas dari di mana mereka dilahirkan dalam sistem sosial.⁷ Ini menunjukkan bahwa teori keadilan mengharuskan institusi Pendidikan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk dapat mengakses Pendidikan tanpa diskriminasi apapun.

Pendidikan inklusi sering kali terganggu oleh anggapan bahwa peserta didik dengan hambatan belajar “tidak mampu” mengikuti pelajaran

⁵ Indah Permata Darma And Binahayati Rusyidi, “Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia,” 2015, 225.

⁶ Rika Widyawati, “Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar,” 2017, 111.

⁷ Larry Alexander, “Fair Equality of Opportunity: John Rawls (Best) Forgotten Principle,” *Philosophy Research Archives* XI (1986): 198.

dan berinteraksi dengan baik dalam lingkungan normal. Namun teori Vygotsky oleh Tamrin mengemukakan dua ide: Pertama, bahwa perkembangan intelektual siswa dapat dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman siswa; Kedua, Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda (sign system) setiap individu selalu berkembang.⁸ Ini menegaskan bahwa ketidakmampuan yang tampak bisa jadi merupakan kurangnya dukungan bukan kurangnya kapasitas individu tersebut. Karena itu peran sosial dalam mendukung tumbuh kembang seorang anak baik secara psikologi dan psikomotorik merupakan peran yang tidak bisa diabaikan.

Dalam ruang lingkup sosial, dukungan sekitar tidak hanya penting perlunya mempertegas pemahaman masyarakat mengenai Pendidikan inklusi. Sehingga tidak menganggap bahwa seorang anak penyandang disabilitas tidak seharusnya bersekolah di sekolah yang “normal”. Sekolah normal ini sering kali di tinjau dari sudut pandang tidak adanya hambatan belajar atau hambatan fisik.

Pendekatan Pendidikan inklusi, yang lemah bukanlah pada anak namun terletak pada ketidakmampuan suatu sistem sekolah untuk mengadopsi pendekatan ini. Ketimpangan ini dapat terlihat dari sistem kebijakan sekolah, kurikulum maupun kompetensi para pengajar. Banyak siswa dengan kebutuhan khusus yang ditempatkan di kelas yang terpisah dengan siswa-siswa lain pada umumnya dan sekolah menyebut dirinya sebagai sekolah inklusif.⁹ Belum lagi respon dan penanganan dari setiap guru terhadap anak berkebutuhan khusus mempengaruhi kualitas kelas itu

⁸ Marwia Tamrin, St. Fatimah S. Sirate, and Muh. Yusuf, “Teori Belajar Vygotsky Dalam Pembelajaran Matematika,” *Sigma (Suara Intelektual Gaya Matematika)* 3, no. 1 (2011): 40–47.

⁹ Nurliana Cipta Apsari and Santoso Tri Raharjo, “Orang Dengan Disabilitas: Situasi Tantangan Dan Layanan Di Indonesia,” *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 3 (2021): 163, <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>.

sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan sistem sekolah serta tenaga pengajar dalam memberikan dukungan yang tepat bagi semua siswa, bukan sekadar menempatkan mereka dalam ruang kelas yang sama.

Problematika Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi pada dasarnya ingin membuka pintu sekolah bagi semua anak, tanpa terkecuali. Dalam praktiknya, niat baik ini tidak selalu berjalan mulus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pendidikan inklusi di Indonesia masih kebingungan bagaimana mendampingi anak berkebutuhan khusus. Studi-studi terdahulu mengungkapkan keterbatasan kompetensi guru dan kebutuhan akan guru yang “khusus” menanggapi hal ini.¹⁰ selain itu, Keterlibatan orang tua dalam pendidikan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan anak, terutama bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Mereka berperan penting dalam mendukung dan membantu proses pendidikan tersebut. Orang tua perlu memahami nilai-nilai inklusif seperti kesetaraan, keadilan, keberagaman, kolaborasi, serta menerima kebutuhan khusus setiap siswa agar proses belajar dan pendidikan bisa berjalan lancar. Sikap orang tua yang positif terhadap nilai-nilai pembelajaran inklusif dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar anak.¹¹ Demikian dengan sekolah, permasalahan yang muncul terkait manajemen sekolah yang kadang belum siap dengan program sekolah inklusi bagi dari segi SDM maupun administrasinya.¹² Di sinilah berbagai masalah pendidikan

¹⁰ Siti Fatimah Salleh, “Masalah Pengajaran Guru Dalam Program Pendidikan Inklusif Di Sekolah,” *Asian People Journal (APJ)*, 2018.

¹¹ Al Darmono, “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2015.

¹² Nissa Tarnoto, “Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD,” 2016.

inklusi mulai terlihat dan perlu dibahas lebih serius agar setiap anak benar-benar mendapat kesempatan belajar yang adil dan manusiawi.

Stigma Sosial dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat Indonesia masih banyak yang memandang sebelah mata terhadap anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus secara jelas merujuk pada anak yang dianggap memiliki perbedaan atau penyimpangan dari kondisi anak normal secara umum, baik dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik dan perilaku sosialnya.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut, anak yang termasuk dalam kategori berkebutuhan di aspek fisik mencakup kelainan pada indra penglihatan (tunanetra), kelainan pada indra pendengaran (tuna rungu), kelainan kemampuan berbicara (tuna wicara), serta kelainan fungsi anggota tubuh (tuna daksa).¹⁴ Stigma negatif ini berakar dari kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak ABK untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Beberapa masyarakat masih menganggap ABK sebagai beban atau aib keluarga yang harus disembunyikan, bukan sebagai individu yang memiliki potensi dan hak yang sama untuk berkembang.¹⁵ Stereotip bahwa ABK tidak mampu belajar atau akan mengganggu proses pembelajaran siswa lain masih kuat di beberapa kalangan, sehingga menimbulkan resistensi terhadap kehadiran ABK di sekolah reguler.

Pandangan negatif tentang Pendidikan inklusi masih kuat dan jelas terlihat dari bagaimana respon masyarakat khususnya para orang tua yang beranggapan bahwa anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang

¹³ Adillah Adillah et al., “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Abk Yang Bersekolah Di Sekolah Umum,” *Jurnal Pendidikan Vokasi Dan Seni (JPVS)*, 2023, 83.

¹⁴ Adillah et al., 83.

¹⁵ Saskia Putri Rahayu and Eddy Marheni, “Perilaku Masyarakat Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Luar Biasa Perwari Padang,” *Jurnal Performa Olahraga*, 2020.

bermasalah dan merepotkan serta dapat mengganggu jika bersekolah bersama anak-anak yang normal. Ini dianggap akan menghambat proses pembelajaran di dalam kelas.

Stigma ini juga terlihat dalam perilaku sehari-hari. Terdapat guru yang, tanpa sadar memberikan label, atau jarang melibatkan anak berkebutuhan khusus dalam aktivitas kelompok. Kadang teman-teman sebayanya mengejek, menghindar, atau hanya melihat mereka sebagai objek kasihan, bukan sebagai teman yang setara. Di luar lingkungan sekolah, bahkan komunitas rohani pun atau masyarakat umum masih memandang anak-anak ini sebagai beban bagi keluarga, bukan sebagai individu yang berharga. Individu dengan disabilitas menghadapi rintangan dan kesulitan akibat stigma serta diskriminasi yang mereka alami, yang pada gilirannya menyebabkan mereka mengalami ketidakadilan dalam masyarakat.¹⁶ Orang dengan disabilitas sering menghadapi diskriminasi di banyak aspek kehidupan mereka, seperti saat mencari pendidikan dan pekerjaan. Hal ini biasanya menjadi sulit karena adanya syarat untuk sehat secara fisik dan mental, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan kehidupan yang baik.¹⁷ semua anak berhak mendapatkan Pendidikan yang layak bagi dirinya agar dapat berkembang dalam berbagai aspek. Oleh sebab itu, Pendidikan inklusi hadir di tengah masyarakat yang majemuk ini untuk merangkul segala bentuk keberagaman yang ada tanpa membeda-bedakan anak.

Kompetensi Guru yang Belum Memadai

Problematikan pertama terkait kesiapan dan kompetensi guru. Mayoritas guru benar-benar ingin menerima semua anak-anak yang ada.

¹⁶ Rahayu and Marheni, 27.

¹⁷ Apsari and Raharjo, "Orang Dengan Disabilitas: Situasi Tantangan Dan Layanan Di Indonesia," 159.

Namun, sejauh ini, mereka belum mendapatkan bekal yang memadai untuk mulai mengajarkan dan mendampingi anak berkebutuhan khusus. Kebanyakan guru kebingungan dan tidak siap bagaimana harus berinteraksi, serta sulit untuk menyesuaikan materi bagi beberapa anak-anak. Selain itu, juga mendistribusikan perhatiannya di antara para siswanya. Penerapan pendidikan inklusif menghadirkan tantangan baru bagi para pendidik, terutama dalam menginisiasi transformasi substansial pada kurikulum pembelajaran dan memastikan kesiapan staf pengajar dalam mengakomodasi seluruh spektrum kebutuhan peserta didik, yang mencakup siswa dengan disabilitas maupun siswa tanpa disabilitas.¹⁸

Di lapangan, kelas inklusi membuat guru kehabisan akal mengelola perbedaan kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan khusus dalam satu ruangan. Ada anak yang membutuhkan penjelasan yang lebih pelan, ada yang butuh alat, dan ada pula yang sangat mudah dalam menangkap pembelajaran. Tanpa keterampilan pembedaan pembelajaran dan bantuan pendamping, guru sering kerepotan menggunakan satu metode pengajaran untuk semua siswa. Akibatnya, sebagian siswa tertinggal, sebagian bosan, dan proses belajar mengajar tidak efisien. Kompetensi guru menjadi faktor yang menonjol, selain minimnya pelatihan dan dukungan sekolah. Guru belum memiliki pengetahuan maupun keterampilan yang mumpuni dalam menangani ABK. Selain belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK, belum terdapat kejelasan aturan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab setiap guru dalam sistem pendidikan inklusi.¹⁹ Kondisi ini diperparah dengan minimnya keterampilan guru dalam mengadaptasi kurikulum dan metode

¹⁸ Yunita Putri and Stephani Raihana Hamdan, "Sikap Dan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar," *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 2021, 146–60.

¹⁹ "Hambatan Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif," *Bentara Campus.*, 2023, <https://bentara.campus.id>.

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik berkebutuhan khusus. Kusmaryono menemukan bahwa tantangan yang dihadapi guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi: (1) tingkat keparahan dan jenis kecacatan siswa (35%), (2) membuat kegiatan yang melibatkan semua siswa (20%), (3) tidak memiliki cukup guru pembantu untuk mengatasi rencana pelajaran individual, (4) membutuhkan banyak waktu dan kontrol kelas menjadi sulit (10%), dan (5) menghadapi tuntutan orang tua dari siswa (10%).²⁰

Tantangan ini mengharuskan pendidik memiliki tingkat keahlian yang tinggi dalam pedagogi diferensiasi, manajemen kelas, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Selain itu, guru harus mampu mengidentifikasi dengan akurat kebutuhan individu siswa untuk memberikan dukungan yang relevan.²¹ Karena itu, pelatihan bagi pendidik atau guru perlu berjalan dengan terarah dan sistematis, bukan sekadar formalitas sesaat. Pelatihan sebaiknya menolong guru benar-benar paham bagaimana menerima, mendampingi, dan mengajar anak berkebutuhan khusus dalam suasana yang aman dan menghargai. Dengan demikian, tujuan utama pendidikan inklusi dapat tercapai, yaitu agar anak-anak berkebutuhan khusus diterima sepenuhnya di sekolah reguler, dapat belajar bersama teman-teman sebaya, serta mengalami perkembangan sosial dan emosional yang sehat. Melalui guru yang terlatih, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar mata pelajaran, tetapi juga ruang bagi setiap anak untuk bertumbuh dalam rasa percaya diri, dimengerti, dan tidak lagi merasa berbeda atau tersisih. Implikasi bagi institusi pendidikan yang

²⁰ I. Kusmaryono, "Challenges of Implementing Inclusive Education in Elementary Schools.," *International Journal of Elementary Education*, 2023, 156-167.

²¹ Ika Ratnaningrum, Wahyu Hidayat, and Tifa Annisa, "Analisis Problematika Guru Dalam Menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Terhadap Implementasi Pendidikan Inklusi," *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2025, 324.

tidak memiliki pendidik pendukung spesialis untuk program inklusif adalah ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan siswa berkebutuhan khusus, khususnya dalam pelaksanaan program individual mereka.²²

Keterbatasan Sarana Prasarana dan Aksesibilitas

Infrastruktur dan fasilitas yang memadai merupakan komponen krusial yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Keterbatasan dalam aksesibilitas fisik sangat menghalangi siswa dengan disabilitas untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam aktivitas sekolah, yang membatasi peluang mereka untuk belajar dan berinteraksi. Dibutuhkan usaha yang terencana dan terus-menerus untuk memperbaiki ketersediaan serta kualitas fasilitas pendidikan yang inklusif.²³ Infrastruktur yang baik mendukung proses belajar anak yang nyaman dan membuat suasana kelas lebih kondusif. Dengan demikian perlu adanya perhatian khusus dalam membangun sarana dan prasarana yang cocok dan ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini lebih parah dialami oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil yang infrastrukturnya masih sangat kurang.

Sebagai contoh menyediakan fasilitas bagi anak yang menggunakan kursi roda, alat visual yang jelas dan memadai, bantuan alat pendengar dan huruf braille bagi anak yang tunarungu, belum lagi anak yang memiliki kecenderungan *hyperactive* membutuhkan ruang gerak yang memadai. Untuk menyelesaikan masalah ini, sekolah membutuhkan kebijakan yang lebih baik mengenai infrastruktur, dukungan yang lebih besar dari pemerintah, dan peningkatan dalam pelatihan bagi para guru.²⁴

²² “Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi,” 2015.

²³ Viola Rheiby Vallentina, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Inklusif: Tantangan Dan Solusi Menuju Sekolah Inklusif Ramah Disabilitas,” *Al-Amin Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2025, 80.

²⁴ Vallentina, 81.

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan dan mendukung perkembangan setiap siswa dalam sebuah lingkungan yang inklusif. Stigma, peran guru, sarana dan prasarana perlu mengalami pembaharuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka yang bersifat kualitatif.²⁵ Bahan kajian diperoleh dari regulasi nasional, artikel ilmiah, buku, dan publikasi teologis yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber primer dan sekunder. Proses analisis dilakukan menggunakan kajian Pustaka kualitatif dengan model critical literatur review. Dengan tiga langkah yakni yang pertama, mengumpulkan data melalui artikel jurnal dan peraturan nasional yang relevan mengenai problematika Pendidikan inklusi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi problematika utama Pendidikan inklusi berdasarkan temuan empiris. Kedua, interpretasi teologis dengan merujuk kepada ayat-ayat Alkitab untuk menemukan tinjauan etis nilai-nilai Kristen. Ketiga, sintesis yang menghasilkan prinsip-prinsip etis kristen dan rekomendasi praktis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan isu-isu secara deskriptif, tetapi juga menawarkan pembacaan kritis dan pemaknaan etis yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan inklusif.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Etis Berdasarkan Nilai Kristen

Tinjauan etis dalam pendidikan inklusi penting karena masalah yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis atau pedagogis, tetapi juga

²⁵ Sugiyono., *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

berkaitan dengan cara manusia dipahami, di perlakukan, dan dihargai dalam sistem pendidikan. Maka itu, penilaian terhadap pendidikan inklusi tidak cukup hanya berdasarkan keberhasilan kebijakan atau metode belajar, tetapi juga harus didasari oleh kerangka etis yang mampu menjawab pertanyaan tentang martabat manusia dan keadilan dalam pendidikan.

Dalam tradisi etika Kristen, konsep *Imago Dei* menjadi dasar utama dalam memahami nilai dan harga diri setiap manusia. Pandangan bahwa manusia dibuat menurut bentuk dan wujud Allah menegaskan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki nilai yang sangat berharga, tidak tergantung pada kemampuan berpikir, tubuh, atau kemampuan sosial mereka. Oleh karena itu, konsep *Imago Dei* memberikan dasar yang kuat bagi pendidikan inklusi, karena menolak segala bentuk perbedaan atau perlakuan tidak adil, serta menekankan tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, manusiawi, dan menghormati perbedaan.

Imago Dei Martabat Manusia Sebagai Dasar Inklusi

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa stigma negatif masyarakat mengenai anak berkebutuhan khusus menjadi hambatan dalam menerapkan pendidikan inklusi di lingkungan sekolah umum. Pola diskriminatif ini mengungkapkan bahwa sebagian besar lingkup pendidikan masih mengutamakan standar normalitas di banding dengan martabat peserta didik sebagai individu yang setara.

Fenomena ini bukan hanya menunjukkan isu sosial dan pendidikan, tapi juga menunjukkan kegagalan dalam memperlakukan manusia dari perspektif teologis Kristen. Doktrin *Imago Dei* bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang disebutkan dalam kitab Kejadian 1:26–27, dalam konteks penciptaan manusia yang

disebutkan dalam Kitab Kejadian, kata "*tselem*" menunjukkan bahwa manusia mencerminkan Allah, yang berarti manusia adalah representasi Allah.²⁶ semua manusia diciptakan sesuai dengan citra dan bentuk Allah.²⁷ Dengan kata lain manusia mencerminkan karakter dan sifat Allah dalam kepribadian dan perilakunya. Manusia tidak hanya diciptakan untuk memiliki relasi dengan Allah namun juga sesama.

Kerangka teologis ini secara implisit menantang standar “normalitas” yang dibangun masyarakat, karena kesetaraan manusia tidak didasarkan pada prestasi, melainkan pada hakikatnya sebagai ciptaan Allah yang bernilai. Sebagai ciptaan Tuhan yang terhormat, manusia diajari agar bisa hidup dengan memiliki sikap yang baik. Sikap yang tidak hanya membawa perubahan baik bagi diri sendiri, tetapi juga bisa mempengaruhi kehidupan orang lain.²⁸ Oleh karena itu, para pendidik memahami maksud dari nilai teologis ini yakni dengan memandang manusia lain termasuk anak berkebutuhan khusus sebagai manusia utuh yang bernilai dan berhak mendapatkan perhatian, perlakuan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan secara merata dan adil.

Saat masyarakat dan lembaga pendidikan memahami dengan serius, kerangka *Imago Dei* dapat berfungsi sebagai dasar etis untuk mengatasi diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus. Pemahaman teologis ini menekankan bahwa perbedaan bukanlah suatu kekurangan tapi justru merupakan keanekaragaman ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Imago Dei* memberikan dasar etis yang kokoh bagi masyarakat dan sekolah untuk mengembangkan sikap yang lebih terbuka

²⁶ Beriaman Ndruru, Jovial Daeli, and Malik Bambang, “Imago Dei: Refleksi Teologis Kejadian 1:26-28 Terhadap Kesadaran Diri Orang Kristen,” *Areopagus: Jurnal Pendidikan Dan Teologi Kristen* 23, no. 1 (2025): 25–36.

²⁷ Aben Tuke Banamtuan et al., “Kedalaman Jiwa: Perspektif Alkitab Tentang Hakekat Manusia,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 2024, 75.

²⁸ Okto Saul Tande Maure and Amirudin Amirudin, “Kajian Teologis Terhadap Citra Diri Manusia Sebagai Ciptaan Yang Mulia,” *Jurnal Teologi Cultivation*, 2023, 55.

serta menghormati keberadaan setiap orang termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Ini dapat menjadi Dasar moral untuk menghapus diskriminasi dan membangun penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus.

Keadilan (*Justice*) Koreksi Terhadap Ketimpangan Sistematis

Problematika keterbatasan kompetensi guru dan ketidaksetaraan sistem pendidikan menandakan bahwa hambatan pendidikan inklusi bukan hanya mengenai individu, tetapi juga pada struktur dan kebijakan pendidikan yang belum mampu menjamin akses yang adil bagi semua peserta. Dalam perspektif etis Kristen, keadaan ini merupakan ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan Allah yang mengharuskan adanya perlindungan bagi mereka yang lemah. Kitab suci menegaskan bahwa keadilan merupakan bagian dari karakter Allah. Nabi Mikha menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama Tuhan bagi umat-Nya adalah “melakukan keadilan” (Mikha 6:8), dalam teks ini ditulis agar mengingatkan umat Tuhan untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Nya. Mikha adalah seorang nabi dari kota Moreshet yang keras menegur dan mengecam para pemimpin Yehuda dan Israel yang korup serta tidak adil.²⁹ Dalam bahasa Ibrani, kata "*mispat*" yang digunakan oleh Nabi Mikha berarti secara harfiah keadilan atau hukum yang adil. Nabi ini secara tajam menekankan pentingnya keadilan sosial, mengkritik penindasan terhadap orang-orang lemah dan mengungkap ketidaksetaraan sosial.³⁰ sebuah panggilan yang

²⁹ Gidion Wayes, “Suatu Kajian Teologis Mikha 6:8 Terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Sebagai Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dan Pemerataan Pendidikan,” *Jurnal Penggerak* 6, no. 1 (July 2024): 171–204, <https://doi.org/10.62042/jtp.v6i1.82>.

³⁰ Esron Mangatas Siregar, Oktapianus Rangkang, and Afriatus Agus, “Prinsip Oikumenis Dan Keadilan Sosial: Analisis Berdasarkan Kitab Mikha 6:8,” *ICHTUS*:

tidak hanya menyangkut hubungan interpersonal, tetapi juga mencakup tindakan sosial yang membela mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan haknya. Allah menghendaki umat-Nya diperlakukan secara adil, tanpa kesenjangan atau diskriminasi.³¹ Itulah bentuk keadilan sejati yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan, sesuai dengan yang diperintahkan-Nya. Ayat ini memberikan landasan teologis bahwa ketidakadilan dalam sistem pendidikan, yakni ketika anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh dukungan yang layak termasuk pendidikan yang di dalamnya dibutuhkan tenaga pendidik yang profesional adalah sebuah kegagalan moral yang harus dikoreksi.

Dalam konteks pendidikan inklusi, prinsip keadilan menuntut adanya distribusi sumber daya manusia yang memadai seperti pelatihan guru yang proporsional, desain pembelajaran atau kurikulum yang adaptif sehingga anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang setara. Jika sekolah tidak berhasil mempersiapkan guru yang berkompetensi pedagogis serta memiliki kepekaan terhadap kebutuhan khusus anak hal tersebut telah membiarkan terjadinya ketimpangan dalam sistem pendidikan.³² Keadilan bukan sekadar konsep abstrak tetapi merupakan lensa etis yang menilai apakah sebuah institusi benar-benar dengan adil mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan semua murid, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap ketimpangan yang ada, tetapi juga sebagai dorongan moral bagi sekolah dan pemerintah dalam membangun pendidikan inklusi yang adil, prinsip ini selaras dengan sila

Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani 6, no. 1 (2025): 5,
<https://doi.org/10.63830/hm2vrf15>.

³¹ Kebenaran Dan and A Tolok Ukur, "KEADILAN," n.d., 42.

³² Abdul Hakim Hidayat et al., "Permasalahan Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar," *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2024, 72.

kelima dalam Pancasila, yaitu “Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”,³³ termasuk semua anak yang berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara.

Hospitalitas Sebagai Tanggung Jawab untuk Menerima dan Merawat

Dalam tradisi Kristen, hospitalitas bukan sekedar menunjukkan sikap ramah, tapi dapat merujuk kepada tindakan membuka ruang bagi orang asing agar merasa diterima serta merasa diperhitungkan atau dianggap.³⁴ Hospitalitas Kristen juga sebuah konsep yang menekankan pada sikap terbuka dan menerima orang lain, terutama mereka yang tidak sama dengan kita. Roma 15:7, Frasa “terimalah satu akan yang lain” menunjukkan penerimaan ini bukan pasif namun aktif. Ini bukan sekedar ajakan hidup berdampingan sebagai makhluk sosial namun ini menekankan bagaimana mengelola keberagaman secara aktif sehingga yang lemah dan kuat berada dalam satu ruang yang sama.

Hospitalis bisa berarti mempersiapkan dan memberikan yang terbaik bagi mereka yang dijumpai, termasuk mereka dengan perhatian khusus. Praktik hospitalitas Kristen juga memberikan dukungan emosional, perhatian, dan doa kepada orang lain. Praktik ini bisa dilakukan dengan memberikan perhatian yang tulus kepada orang lain, mendengarkan dan memahami kesulitan mereka, serta memberikan pelukan atau kesan hangat kepada mereka. Hospitalitas merupakan suatu sikap hakiki kepada sesama manusia, yang dapat ditunjukkan dalam

³³ Kerja Sama UPN Internasional, “UUD1945” 2, no. 1 (1945): 73–80, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

³⁴ Heni Maria et al., “Tantangan Dan Peluang Praktek Hospitalitas Kristen Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 4, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.54553/kharisma.v4i1.118>.

berbagai macam cara.³⁵ Kala manusia melihat sesamanya yang lain, maka sebenarnya mereka melihat gambar Allah yang sama dan kemanusiaan yang sama, yang menjadi dasar dalam martabat dan rasa hormat untuk membangun kehidupan bersama.³⁶

Dalam konteks pendidikan inklusi, hospitalitas menjadi nilai etis yang relevan karena menuntut sekolah menyediakan ruang yang sungguh-sungguh menerima anak berkebutuhan khusus. Hospitalitas tidak mengubah orang, namun menawarkan mereka suatu ruang di mana perubahan dapat terjadi.³⁷ Penerimaan ini bukan hanya mencakup sosial emosional tapi juga secara fisik. Secara fisik, hospitalitas mendorong adanya penyediaan fasilitas yang memadai dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus, tidak hanya sekadar hadir tapi juga terlibat dalam belajar dan bermain dengan layak.

Dengan demikian hospitalitas tidak dapat dipisahkan dari pelayanan. Dalam Teologi Kristen menerima berarti juga memelihara dan menjaga orang tersebut. Ketika seorang guru menyesuaikan kurikulum, membuat inovasi praktik pembelajaran, ia sedang menghidupi hospitalitas dalam bentuk pelayanan praktis. Ketika sekolah mengalokasikan anggaran untuk mengadakan ruang belajar dan berinteraksi yang ramah disabilitas, itu bukan sekadar kebijakan sistem sekolah namun merupakan tindakan hospitalitas sebagai nilai etis komunitas. Secara keseluruhan, hospitalitas merupakan nilai etis yang paling komprehensif dalam mendukung pendidikan inklusi.

Kesimpulan

³⁵ Mariani Febriana, "Yang Terlupakan Di Tengah Maraknya," *Jurnal Teologi Biblika & Praktika, Sola Gratia* 6, No. 1 (2018): 57–96.

³⁶ Febriana.

³⁷ Febriana.

Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan setara bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mengakses pendidikan berkualitas dalam lingkungan yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip-prinsip fundamental pendidikan inklusi mencakup pemerataan dan peningkatan mutu, kebutuhan individual, kebermaknaan, keberlanjutan, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan utama pendidikan inklusi adalah mewujudkan amanat konstitusi tentang hak pendidikan bagi semua warga negara serta membangun masyarakat yang toleran, empatik, dan menghargai keberagaman.

Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia menghadapi berbagai problematika kompleks yang melibatkan berbagai dimensi. Hambatan utama yang dihadapi penyelenggara pendidikan inklusi meliputi keterbatasan kompetensi dan kesiapan guru dalam menangani ABK, minimnya sarana dan prasarana yang aksesibel, kebijakan pemerintah daerah yang belum optimal, serta manajemen sekolah yang belum mendukung secara efektif. Peserta didik berkebutuhan khusus juga menghadapi tantangan signifikan berupa kesulitan adaptasi dalam lingkungan belajar, kurangnya dukungan individual yang memadai, hambatan interaksi sosial dan diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap sumber belajar adaptif. Faktor sosial budaya seperti stigma negatif, persepsi orang tua dan masyarakat yang kurang positif, rendahnya kesadaran publik, serta nilai dan norma budaya lokal yang belum mendukung turut mempersulit implementasi pendidikan inklusi.

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, diperlukan strategi komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak. Pertama, penerapan model dan pendekatan pembelajaran yang efektif seperti pembelajaran diferensiasi, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran

berbasis masalah, penggunaan teknologi assistive, dan implementasi Program Pembelajaran Individual yang konsisten. Kedua, penguatan peran orang tua, guru, guru pendamping khusus, dan komunitas dalam mendukung pendidikan inklusi melalui kolaborasi yang sinergis dan berkelanjutan. Ketiga, komitmen kuat dari pemerintah dalam bentuk penguatan regulasi dan kebijakan, alokasi anggaran yang memadai, pengembangan sistem dukungan profesional, program pelatihan berkelanjutan, pengembangan kurikulum yang fleksibel, sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, kampanye publik yang masif, serta kerjasama strategis dengan berbagai pihak.

Dipandang dari perspektif etika Kristen, situasi ini dianggap sebagai kegagalan dalam menghargai martabat manusia sebagai gambar Allah, melanggar prinsip keadilan, serta belum mewujudkan nilai hospitality dalam menerima dan melayani mereka yang lemah. Prinsip *Imago Dei* mengingatkan bahwa setiap anak termasuk yang berkebutuhan khusus memiliki nilai dan hak yang sama dengan manusia lainnya. Selanjutnya, prinsip keadilan menegur sebuah sistem pendidikan yang tidak merata dan adil terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang sebenarnya bisa jika sistem, kurikulum dan kompetensi guru cukup untuk menerima keberadaan mereka. Terakhir, nilai hospitalis menuntut pemerintah, guru, orang tua, masyarakat umum untuk menyediakan ruang aman, bersahabat, dimana anak berkebutuhan khusus dapat berkreasi, diterima, bertumbuh dan didengar serta diperlakukan penuh kasih.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas untuk meningkatkan pelatihan guru, mempersiapkan fasilitas yang ramah disabilitas, serta membangun budaya penerimaan, agar pendidikan inklusif dan adil dapat tercapai bagi seluruh anak. Pendidikan inklusi menjadi tanda nyata keadilan sosial bagi seluruh

anSSSak. Nilai-nilai etis Kristen diharapkan dapat berkontribusi dalam mengubah cara pandang masyarakat umum mengenai pendidikan inklusi.

Kepustakaan

- Adillah, Adillah, Serawati Serawati, Opi Andriani, and Yelvia Prahagia. "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Abk Yang Bersekolah Di Sekolah Umum." *Jurnal Pendidikan Vokasi Dan Seni (JPVS)*, 2023.
- Alexander, Larry. "Fair Equality of Opportunity: John Rawls (Best) Forgotten Principle." *Philosophy Research Archives XI* (1986).
- Apsari, Nurliana Cipta, and Santoso Tri Raharjo. "Orang Dengan Disabilitas: Situasi Tantangan Dan Layanan Di Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 3 (2021): 159–69. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i3.3069>.
- Banamantuan, Aben Tuke, Aprianus Lendrik, Moimau Sekolah, Teologi Injili, Pandangan Alkitab, H Manusia, and Kedalaman Jiwa. "Kedalaman Jiwa: Perspektif Alkitab Tentang Hakekat Manusia." *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 2024.
- Dan, Kebenaran, and A Tolok Ukur. "Keadilan," n.d., 27–52.
- Darma, Indah Permata, and Binahayati Rusyidi. "Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia," 2015.
- Darmono, Al. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2015.
- Febriana, Mariani. "Yang Terlupakan Di Tengah Maraknya." *Jurnal Teologi Biblika & Praktika, Sola Gratia* 6, No. 1 (2018): 57–96.
- "Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi," 2015.
- "Hambatan Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif." Bentara Campus., 2023. <https://bentara.campus.id>.

- Hidayat, Abdul Hakim, Anisa Rahmi, Nyai Ai Nurjanah, Yusuf Fendra, and Wismanto Wismanto. "Permasalahan Penerapan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2024.
- Kusmaryono, I. "Challenges of Implementing Inclusive Education in Elementary Schools." *International Journal of Elementary Education*, 2023, 156-167.
- Maria, Heni, Sari Salenda, Ovio Vivian, Frans Geril Batara, and Wandu Daniel Pajan. "Tantangan Dan Peluang Praktek Hospitalitas Kristen Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)." *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 4, no. 1 (2023): 1–16.
<https://doi.org/10.54553/kharisma.v4i1.118>.
- Maure, Okto Saul Tande, and Amirudin Amirudin. "Kajian Teologis Terhadap Citra Diri Manusia Sebagai Ciptaan Yang Mulia." *Jurnal Teologi Cultivation*, 2023.
- Ndruru, Beriaman, Jovial Daeli, and Malik Bambang. "Imago Dei: Refleksi Teologis Kejadian 1:26-28 Terhadap Kesadaran Diri Orang Kristen." *Areopagus: Jurnal Pendidikan Dan Teologi Kristen* 23, no. 1 (2025): 25–36.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. (n.d.).
- Putri, Yunita, and Stephani Raihana Hamdan. "Sikap Dan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar." *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 2021.
- Rahayu, Saskia Putri, and Eddy Marheni. "Perilaku Masyarakat Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Luar Biasa Perwari Padang." *Jurnal Performa Olahraga*, 2020.

- Ratnaningrum, Ika, Wahyu Hidayat, and Tifa Annisa. “Analisis Problematika Guru Dalam Menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Terhadap Implementasi Pendidikan Inklusi.” *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2025.
- Salleh, Siti Fatimah. “Masalah Pengajaran Guru Dalam Program Pendidikan Inklusif Di Sekolah.” *Asian People Journal (APJ)*, 2018.
- Sari, P. M., & Hendriani, W. “Hambatan Dalam Implementasi Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur.” *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 2021, 163-175.
- Siregar, Esron Mangatas, Oktapianus Rangkang, and Afriatus Agus. “Prinsip Oikumenis Dan Keadilan Sosial: Analisis Berdasarkan Kitab Mikha 6:8.” *ICHTUS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.63830/hm2vrf15>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tamrin, Marwia, St. Fatimah S. Sirate, and Muh. Yusuf. “Teori Belajar Vygotsky Dalam Pembelajaran Matematika.” *Sigma (Suara Intelektual Gaya Matematika)* 3, no. 1 (2011): 40–47.
- Tarnoto, Nissa. “Permasalahan-Permasalahan Yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Pada Tingkat SD,” 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
- UPN Internasional, Kerja Sama. “UUD1945” 2, no. 1 (1945): 73–80. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Vallentina, Viola Rheiby. “Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan

Inklusif: Tantangan Dan Solusi Menuju Sekolah Inklusif Ramah Disabilitas.” *Al-Amin Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2025.

Wayes, Gidion. “Suatu Kajian Teologis Mikha 6:8 Terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Sebagai Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dan Pemerataan Pendidikan.” *Jurnal Penggerak* 6, no. 1 (July 2024): 171–204.

<https://doi.org/10.62042/jtp.v6i1.82>.

Widyawati, Rika. “Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar,” 2017.